

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang juga pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain guna mengemukakan pula perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dilakukan guna menghindari kesamaan. Berikut hasil penelitian yang berhasil peneliti temukan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian dari Andito, dkk (2013) tentang “evaluasi implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobongan”. Berdasarkan penelitiannya implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi (Pamsimas), memiliki sasaran-sasaran yang hendak dicapai yaitu mengenai cakupan perubahan perilaku dimana didalamnya mencakup akses air bersih, jamban sehat, stop buang air besar sembarangan dan membiasakan cuci tangan pakai sabun (CTPS), kemudian penguatan kelembagaan khususnya ditingkat desa. Selanjutnya juga terdapat beberapa aspek pendukung dan penghambat dari implementasi program pamsimas itu sendiri, yaitu:
 - a. Akses terhadap air bersih, program pamsimas terbukti membantu masyarakat kecamatan karangrayung dalam memenuhi

- akses kebutuhan air mereka. Masyarakat Kecamatan Karangrayung yang semula menggunakan sumber air dari alam seperti sendang, sungai dan sumur dali mulai menggunakan pamsimas sebagai sumber air mereka, walaupun tidak semuanya mengakses sumber air dari pamsimas.
- b. Kebiasaan buang air besar sembarangan dan akses jamban sehat, kebiasaan buang air besar di Kecamatan Karangrayung menurun seiring dengan membaiknya akses air bersih serta pemicuan dari fasilitator pamsimas yang membutuhkan kesadaran mereka agar tidak lagi kebiasaan buang air besar sembarangan. Akses jamban sehat di Kecamatan Karangrayung mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit, hal ini diakibatkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik.
 - c. Perilaku hidup bersih dan sehat, kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS) hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat, mereka hanya menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai air tanpa menggunakan sabun. Sarana pendukung kebiasaan CTPS di Kecamatan Karangrayung masih kurang, khususnya untuk sekolah-sekolah tingkat desa.
 - d. Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa, ditingkatkan desa dibentuk organisasi pengelola pamsimas melalui musyawarah desa dengan dihadiri tokoh masyarakat, kepala desa, pamong desa dan didampingi oleh fasilitator. Organisasi

pengelola pamsimas mempunyai tugas mengelola, memantau, merawat, baik sarana fisik, finansial dan pelaksanaan pamsimas, hingga pelayanan terhadap masyarakat, instalasi dan penentuan besaran biaya bulanan masyarakat yang mengakses pamsimas. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi program pamsimas berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa aspek sasaran yang kurang tercapai, perlu adanya perbaikan dan menyempurnakan agar implementasi program pamsimas yang ada lebih berjalan maksimal sesuai dengan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

2. Hasil Penelitian dari Sitranata & Santoso (2016) tentang “Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Tembalang”. Berdasarkan penelitian pelaksanaan kinerja pamsimas di Kecamatan Tembalang dinilai masih banyak kekurangan, empat dari enam kriteria yang digunakan masih belum bisa dikatakan berhasil yang mengakibatkan kinerja Pamsimas di Kecamatan Tembalang dikatakan rendah dan belum optimal. Dilihat dari tiga faktor yaitu, sumber daya manusia yang masih kurang baik segi kuantitas maupun kualitas, sumber daya anggaran sangat terbatas mengingat anggaran yang diberikan dari Kota Semarang juga kecil. Faktor kelembagaan juga masih belum baik disebabkan banyaknya pihak yang terkait dengan pamsimas lembaga tersebut belum berfungsi sepenuhnya. dan faktor

komunikasi yang diterapkan sudah cukup baik. Upaya untuk mengatasi kurangnya kecukupan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk memahami buku pedoman dan petunjuk teknis supaya akurat sebagai pertimbangan evaluasi selanjutnya.

3. Hasil penelitian dari Faza (2014) tentang “Evaluasi Keberhasilan Program penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) di Kabupaten Tegal”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Evaluasi Keberhasilan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten tegal merupakan suatu program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang di daerah membutuhkan sarana air bersih dan sanitasi yang dikelola dan dibuat secara swadaya baik dari pemerintah maupun masyarakat dan pihak swasta. Faktor evaluasi program ini menyangkut organisasi pelaksana program dan penerima manfaat sedangkan faktor upaya perbaikan keberhasilan program menyangkut proses pengambilan keputusan organisasi, persyaratan tugas dan wewenang, kompetensi dari staf pelaksana, ekspresi tuntutan. Hasil penelitian evaluasi keberhasilan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten Tegal ini masih terdapat kendala pada beberapa aspek seperti organisasi pelaksana dengan penerima manfaat, harus adanya jalinan komunikasi antar pengelola baik pemerintah maupun masyarakat agar lebih baik lagi, kesadaran

masyarakat akan air bersih masih kurang.

4. Hasil penelitian dari Jenawi (2017) tentang “Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bintan (studi Kampung Jeropet, Desa Teluk Bakau dan Desa Malang Rapat) berdasarkan penelitian yang dilakukan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di tiga lokasi belum dapat dikatakan baik karena setelah dievaluasi berdasarkan teori evaluasi CIPP menunjukkan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat khususnya PNPM Mandiri dari ketiga lokasi hanya satu lokasi yang dilaksanakan cukup baik yakni Kampung Jeropet kelurahan Kawal. Hal ini dapat terlihat dari hasil temuan yang telah dievaluasi menunjukkan bahwa bantuan pinjaman dana bergulir di sana dapat membantu memodali usaha masyarakat setempat sedangkan di Desa Teluk Bakau pelaksanaan PNPM Mandiri tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan masyarakat kurang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan penggunaan dana harus dipakai untuk membangun apa. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Malang Rapat juga kurang sesuai dengan kebutuhan sekalipun ada juga program yang dapat meringankan beban masyarakat yakni PNPM Mandiri yang diperuntukkan sebagai pemenuhan tempat tinggal layak huni. Masyarakat yang menerima dampak di masing-masing lokasi,

seperti di lokasi pertama yakni Kampung Jeropet merasakan dampak positif dari program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di sana khususnya PNPM Mandiri Perdesaan dana bergulir yang membantu masyarakat memulai usahanya. Selain itu masyarakat di Kampung Jeropet juga merasakan dampak negatif yakni angsuran pengembalian pinjaman yang dirasa cukup berat dan membebani masyarakat. Masyarakat di Desa Teluk Bakau merasakan kebingungan dengan pengadaan taman bacaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan utama mereka sedangkan di Desa Malang Rapat masyarakatnyamerasa cukup terbantu dengan adanya PNPM Mandiri Perkim. Program pemberdayaan yang dilaksanakan di tiga lokasi banyak yang tidak se-suai dengan prinsip - prinsip dasar PNPM Mandiri yaitu bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi kepada masyarakat miskin, prioritas, kolaborasi, partisipasi, demokratis dan lain sebagainya. Pelaksanaan PNPM Mandiri yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar PNPM Mandiri contohnya tidak memprioritaskan kebutuhan utama masyarakat seperti di Desa Teluk Bakau yang menjadi kebutuhan utama masyarakat ialah pengadaan air bersih bukan pembangunan taman bacaan. Pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada rakyat harus mendengarkan usulan dan pengambilan keputusan dirembukkan bersama- sama sebagaimana prinsip dasar PNPM Mandiri yang salah satunya demokratis yaitu

pengambilan keputusan harus berdasarkan mufakat dan musyawarah yang telah dilakukan. Temuan lainnya berupa tertundanya penyelesaian jalan aspal yang menjadi infrastruktur Perdesaan. Padahal masyarakat telah memberikan tanahnya kepada pemerintah jika ingin dibangun jalan aspal karena jalan merupakan akses pembangunan pembuka yang utama untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Jika melihat dari hasil evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri di tiga lokasi di Kabupaten Bintan yang telah ada, penulis merekomendasikan beberapa pemikiran penulis yaitu sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bintan menyesuaikan program pemberdayaan dengan karakteristik wilayah yang dimiliki di masing-masing daerah sehingga pelaksanaan nantinya akan benar-benar dapat memberdayakan masyarakat setempat dengan pemanfaatan potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Bintan harus lebih memperhatikan keadaan ataupun kondisi masyarakat yang seperti ini agar program bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat.

B. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Pada Penelitian terdahulu yang tersaji diatas terdapat beberapa perbedaan diantaranya sebagai berikut, yang pertama Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi program pamsimas berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa aspek sasaran yang kurang tercapai, perlu adanya perbaikan dan

menyempurnakan agar implementasi program pamsimas yang ada lebih berjalan maksimal sesuai dengan sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Pada penelitian kedua ada beberapa temuan diantaranya adalah tiga faktor yaitu, sumber daya manusia yang masih kurang baik segi kuantitas maupun kualitas, sumber daya anggaran sangat terbatas mengingat anggaran yang diberikan dari Kota Semarang juga kecil. Faktor kelembagaan juga masih belum baik disebabkan banyaknya pihak yang terkait dengan pamsimas lembaga tersebut belum berfungsi sepenuhnya. dan faktor komunikasi yang diterapkan sudah cukup baik. Upaya untuk mengatasi kurangnya kecukupan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk memahami buku pedoman dan petunjuk teknis supaya akurat sebagai pertimbangan evaluasi selanjutnya.

Dan yang terakhir pada penelitian terdahulu ada perbedaan di antaranya Hasil penelitian evaluasi keberhasilan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten Tegal ini masih terdapat kendala pada beberapa aspek seperti organisasi pelaksana dengan penerima manfaat, harus adanya jalinan komunikasi antar pengelola baik pemerintah maupun masyarakat agar lebih baik lagi, kesadaran masyarakat akan air bersih masih kurang.

C. Landasan Teori

1.1 Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Terdapat beberapa macam definisi dari evaluasi yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli. Menurut Fathoni (2016), menyatakan secara harfiah kata

evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Asal katanya adalah *value* yang berarti nilai, jadi evaluasi adalah sebuah kegiatan untuk menentukan nilai dari sesuatu kegiatan. Sedangkan menurut Rinda Hedwig (2006) mengungkapkan bahwa proses yang dilakukan secara konsisten untuk menjaga proses pengawasan (monitoring) dan evaluasi secara internal yaitu pada proses yang memuat kegiatan audit, penilaiandan evaluasi.

Menurut Ziervogel (2008), evaluasi adalah sebuah kegiatan penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan saat proyek selesai dilaksanakan ataupun saat sedang berjalan. Dengan tujuan melihat relevansi dari pemenuhan tujuan, pengembangan efisiensi, efektifitas hingga dampak yang berkelanjutan. Kegiatan evaluasi ini memberikan informasi yang kredibel atau dapat dipercaya sebagai proses penentuan nilai. Penilaian ini menggunakan standar yang tepat untuk pemeriksaan kinerja suatu program atau kegiatan.

Evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas, selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan tersebut telah dicapai (Purwanto, 2002).

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna

bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Evaluasi menurut Kaihatu bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dapat menentukan nilai maupun seberapa penting sebuah kegiatan, program, atau suatu program (Kaihatu, 2006). Evaluasi adalah sebuah proses penilaian yang seobyektif dan sistematis mungkin terkait dengan sebuah tekanan yang direncanakan atau tengah berlangsung yang telah diselesaikan. Hal-hal yang semestinya dievaluasi yaitu berupa program, proyek, kebijakan, sektor, organisasi, tematik, serta bantuan Negara.

Menurut Yunanda pengertian evaluasi adalah kegiatan yang dalam pelaksanaannya direncanakan untuk dapat menentukan keadaan sebuah objek dengan menggunakan instrumen serta hasilnya dapat dibandingkan dengan suatu patokan untuk kemudian menjadi kesimpulan (Yunanda dalam Sapitri, 2014). Sementara menurut Griffin & Nix menyatakan bahwa evaluasi biasanya didahului oleh suatu penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran, dimana pengukuran diartikan sebagai suatu kegiatan guna membandingkan pengamatan dengan sebuah kriteria penilaian (*assessment*) yang ada (Griffin & Nix dalam Widoyoko, 2005). Kriteria penilaian yang dimaksud yaitu kegiatan untuk menafsirkan serta menggambarkan hasil dari suatu pengukuran, sedangkan evaluasi digunakan guna menentukan suatu nilai serta implikasi dari perilaku.

Menurut Afriani (2017) evaluasi mempunyai pengertian yang berhubungan atau masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai

terhadap hasil kebijakan ataupun program. Serta dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha dalam menganalisis hasil kebijakan mengenai arti satuan nilainya.

Menurut Arikunto mengatakan bahwa evaluasi adalah proses penggambaran, mencari serta memberikan informasi yang sangat berguna untuk pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan tersebut (Arikunto, 2010). Maka evaluasi diartikan sebagai suatu proses penilaian terhadap pentingnya suatu kegiatan ataupun kebijakan sehingga kita dapat membandingkan apakah kegiatan atau kebijakan yang dibuat itu sudah efektif ataupun efisien. Evaluasi juga memberikan gambaran mengenai informasi yang telah diperoleh sehingga keputusan akhir dapat ditentukan. Winarno (2013) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan tahap akhir dari sebuah siklus kebijakan. Secara umum dapat diartikan sebagai tahap penilaian dari hasil kinerja pegawai atau karyawan suatu organisasi. Sejalan dengan ini proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Evaluasi perbandingan yang dilakukan atas tujuan yang hendak dicapai untuk penyelesaian masalah dengan hasil atau kejadian yang sebenarnya terjadi.

Menurut Dunn evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kinerja dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003).

Jadi dapat disimpulkan evaluasi adalah sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menilai dan menentukan sebuah ukuran suatu program kegiatan telah tepat sasaran atau telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum.

1.1.2 Prinsip-prinsip Evaluasi

Prinsip-prinsip evaluasi, menurut Fattah dalam Samuel (2008), mengemukakan ada 6 prinsip, yaitu:

1. Prinsip berkelanjutan, yang artinya dilakukan secara berlanjut
2. Prinsip menyeluruh, yang artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus di evaluasi.
3. Prinsip bersifat obyektif, yang artinya pelaksanaanya bebas dari kepentingan pribadi.
4. Prinsip valid, yang artinya mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur.
5. Prinsip pengguna yang kritis.
6. Prinsip yang memperhatikan kegunaan atau manfaat.

b. Tujuan Evaluasi

Menurut (Kusek & Rist, 2004) mengemukakan beberapa tujuan dari evaluasi diantaranya:

1. Membantu pembuatan keputusan alokasi sumber daya
2. Membantu memikirkan kembali sebuah penyebab dari permasalahan
3. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan darurat

4. Memberi support kepada pengambil keputusan untuk bersaing dan memberikan cara-cara alternative terbaik
5. Memberi dukungan terhadap inovasi dan reformasi sektor publik
6. Membangun sebuah konsensus pada akar masalah dan cara menanggapinya.

c. Tipe Evaluasi

Menurut (Kusek & Rist, 2004) ada beberapa tipe evaluasi yaitu:

1. Performance Logic Chain Assessment

Model evaluasi seperti ini digunakan untuk menentukan kekuatan dari program, kebijakan dan proyek.

2. Evaluasi Pre implementation assessment

Strategi evaluasi Pre-implementation assessment merujuk pada tiga standar khusus yang harus diartikulasikan secara jelas sebelum seorang pemimpin bergerak ke fase implementasi.

3. Process Implementation Evaluation

Fokus dari evaluasi pada proses implementasi adalah pada sebuah detail dari implementasi yang dilaksanakannya. Apa saja yang sudah diimplementasikan atau belum diimplementasikan dari sebuah rencana.

4. Rapid Appraisal

Metode *Rapid Appraisal* bisa dikarakteristikan menjadi sebuah metode kompleks dengan berbagai pendekatan metode evaluasi yang menggunakan koleksi data berupa angka-angka. Metode ini membutuhkan informasi yang cepat dalam jangka waktu yang sesuai tapi relative murah anggaran yang digunakan.

5. *Case Study*

Metode ini biasanya digunakan ketika seorang pemimpin membutuhkan sebuah informasi mendalam untuk memahami secara jelas apa yang terjadi terhadap sebuah kebijakan, program, atau proyek.

6. *Impact Evaluation*

Metode ini mencoba untuk menentukan porsi dari dampak sebuah dokumen, penyebab intervensi, dan kemungkinan apa yang datang dari kegiatan atau kondisi lainnya.

7. *Meta-Evaluation*

Menetapkan sebuah kriteria dan prosedur-prosedur untuk sebuah jalur sistematis bagi evaluasi-evaluasi yang ada untuk memandang kedepan demi menyimpulkan sebuah trend dan menghasilkan sebuah kepercayaan diri dalam penemuan studi yang lain.

d. Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi harus memuat nilai-nilai evaluasi menurut Hamilton & Ziervogel (2008) sebagai berikut:

1. Standar tinggi etika profesional

Nilai ini lebih dikenal dengan kode etik umum yang harus diataati oleh setiap Pegawai Negeri dari suatu instansi pemerintah. Penerapan nilainya dimulai dari input hingga output dari suatu program yang dijalankan dan di dalamnya berisikan evaluasi etika, pengelolaan konflik kepentingan, etika tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaporan perilaku yang tidak etis, pelatihan etika, penyaringan sebelum kerja, sehingga nantinya dapat terlihat perilaku professional

dan etis dalam kinerja personil dari Pegawai Negeri tersebut.

2. Efisiensi

Nilai ini diterapkan untuk mengolah sumberdaya agar berdaya guna dan tepat, terutama dalam hal biaya program. Adapun dalam penilaiannya berisikan tentang hasil perencanaan, pelaksanaan, pencapaian, pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaan.

3. Efektifitas

Nilai ini digunakan untuk melihat seberapa baik *output* dan *outcome* dari tujuan program yang dicapai dan seberapa sesuainya *output* dengan hasil yang diinginkan. Ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria adapun kriteria tersebut yaitu, input, proses produksi, output dan produktivitas.

4. Berorientasi Pada Pembangunan

Dalam prakteknya, suatu program harus berorientasi dalam pembangunanhal ini berarti bahwa setiap hari kegiatan administrasi publik harus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung dan masyarakat tidak mampu.

5. Pelayanan Tidak Memihak

Pelayanan atau program yang diberikan haruslah menjunjung persamaan hak dan keadilan, pemerintahan harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dan menikmati proses pelayanan kegiatan, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.

6. Bertanggung jawab

Merupakan nilai kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk bertanggungjawab dalam keberhasilan serta kegagalan sebuah program yang dilaksanakan.

7. Akuntabilitas

Nilai ini merupakan aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan sebagai penanggungjawab dari semua tindakan yang dilakukan dalam program dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Indikator akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas program.

8. Transparansi

Pelayanan program pemerintahan yang baik akan bersifat terbuka dan akurat terhadap masyarakatnya. Nilai juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan atau mengusulkan sebuah pendapat atau kritikan terhadap pemerintah yang dirasa kurang terbuka atau transparan. Transparansi dapat diukur melalui indikator sebagai berikut, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

9. Dilaksanakan oleh SDM yang baik dan mampu

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dipilih dengan baik akan memudahkan program yang dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi manusia tersebut.

10. Administrasi publik dapat mewakili kalangan luas

Meskipun terdapat kepentingan yang berbeda dalam tujuan pelayanan

program akan tetapi intinya tetap berorientasi pada perwakilan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

1.2 Program

a. Pengertian Program

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli terkait dengan pengertian program. Diantaranya, Menurut Zainudin (2014), program adalah sebuah rancangan atau rencana pelaksanaan kegiatan dengan asas serta usaha dalam melaksanakan kegiatan atau program. Sedangkan menurut Wijayanti (2016) Program adalah sebuah unsur utama yang harus ada untuk menciptakan suatu kegiatan, yang dijelaskan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Tujuan dari kegiatan yang akan dicapai
2. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan
3. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
4. Strategi pelaksanaan

Melalui adanya program dalam setiap rencana kegiatan akan lebih tersusun dan memudahkan dalam pengoperasiannya. Hal ini didukung dengan pengertian program yang dijelaskan sebagai berikut, program adalah kumpulan dari beberapa kegiatan atau program yang telah di susun untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selaras serata secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan (Wijayanti,2016).

Menurut Siagian (2006) Program adalah suatu bentuk rencana yang akan dilaksanakan sebagai salah satu unit ataupun kumpulan dari kegiatan yang menjadi bentuk realisasi atau pengimplemntasian yang berasal dari kebijakan

langsung yang memiliki kesinambungan yang terjadi didalam suatu organisasi yang melibatkan beberapa atau sekelompok orang. Dari penjelasan itu dapat ditekankan bahwa program mempunyai 3 unsur penting yaitu sebagai berikut:

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi bersama berkesinambungan.
3. Terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa program ialah sekumpulan bentuk rencana atau rancangan yang akan dilakukan sebagai satu kesatuan atau unit dari serangkaian kegiatan yang menjadi bentuk realisasi atau implementasi dari sebuah kebijakan langsung yang mempunyai kesinambungan dalam sebuah organisasi yang melibatkan beberapa atau sekelompok orang.

1.3 Program Pamsimas

Berdasarkan Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan

lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Ruang lingkup dari Program Pamsimas mencakup lima komponen program, yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa.
2. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi;
3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum;
4. Hibah Insentif dan,
5. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

Percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 membutuhkan upaya bersama dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Desa dan masyarakat, termasuk donor dan swasta (CSR). Pamsimas menjadi program air minum dan sanitasi yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menjadi program bersama dalam rangkapencapaian akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan pada tahun 2019. Pelaksanaan Program Pamsimas Tahun 2008-2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan

sehat melalui pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi.

Program Pamsimas III yang dilaksanakan pada tahun 2016-2019, kelanjutan dari Program Pamsimas I dan II (tahun 2008-2015) yang merupakan instrumen pelaksanaan dua agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu dengan (1) 100%-100% akses air minum dan sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019 di sektor air minum dan sanitasi, melalui perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.